

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdilah Masykuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respons Intelektual Muslim Indonesia 1966-1993*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Antlöv, Hans dkk., (ed.) “Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia” dalam Modul Tata Kelola Desa.
- Ardipandanto Aryojati dkk., (ed.) *Dinamika Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016.
- Dhoho, A. Sastro, dkk., (ed.) *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta: Pelitaraya Selaras, 2010.
- Efendy Jonaedi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group 2018.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, 2010.
- J Lexy. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 1999.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, 2020.
- Narbuko Abu, dkk., (ed.) *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Sendhikasari, Dewi D. dkk., (ed.) *Tata Kelola Pembangunan Desa*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Subagiyo Henri dkk., (ed.) *Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, 2009.

RPJM-Kantor Desa Sindangratu Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak Tahun 2022.

Suharno, dkk., (ed.) *Keterbukaan Dan Keadilan.Indonesia*, PT Ghalia. 2006.

Suparyo Yossy, “Modul Tata Kelola Desa”.
<https://www.gedhe.or.id/wp-content/uploads/2018/03/Modul-2-Tata-Kelola-Desa.pdf>

Zaenal, Entol Muttaqin, *Pokok-pokok Hukum Ketatanegaraan*, Serang: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014.

Skripsi:

Fahmi Aszhar Nur, "Implementasi Asas Keterbukaan dalam Pelayanan Kependudukan di Desa Kalibagor Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas", Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017. <http://lib.unnes.ac.id/31829/>.

Sholihin Asep, “Kebebasan Informasi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2011.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1500>

Jurnal:

Bunga Marten, “Model Pembentukan Peraturan Daerah yang Ideal dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 4 (2019), Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2342>

Endah Kiki, “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* Vol. 5 No. 1 (2018), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Galuh.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1224>

Mahlel dkk., (ed.) “Akuntabilitas dan Transparansi berbasis bagi Hasil (Analisis terhadap Karyawan Toko di Kota Beureuneun), *Jurnal*

EBIS, Vol. 2 No. 2 (April 2006), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ebis/article/view/180>

Noer Eko Kristiyanto, “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Urgency of Disclosure of Information the Implementation of Public Service)”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Akreditasi LIPI (Juni 2016).
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/59/11>

Retnowati Endang, “Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)”, *Jurnal Perspektif* Vol. 17, No. 1 (Januari 2008) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/94>.

Setiawan Agus, dkk., (ed.) “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2013) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran.
<http://jurnal.unpad.ac.id/jkk/article/view/6044/3155>

Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik”, *Jurnal Administrative Law & Governance*, Vol. 2 No. 3 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6521>

Undang-Undang:

Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2015, dan Transmigrasi Republik Indonesia, “Pedoman Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa”. <https://jdih.kemendes.go.id/>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tahun Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
<http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2014/uu23-2014bt.pdf>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39047/uu-no-14-tahun-2008>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>

Website:

BAPPEDA, Desa Sindangratu Kecamatan Panggarangan Kabupaten Lebak https://disada.lebakkab.go.id/pt_BR/dataset/capaian-rpjmd-kabupaten-lebak-tahun-2019

Sutrisni Arum Putri “Tata Sosial Masyarakat Desa”, *Kompas*, (Diakses 17 Januari 2022).
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/10/140000069/tata-sosial-masyarakat-desa?page=all>

Website Pemerintah Desa Kadudamas, “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)”.

<https://desakadudamas.com/uncategorized/ppid/ppid/>

Al-Qur'an Indonesia, *Tafsir Al Jalalain*, Kemenag RI: Surah Al Maidah.